



# KLIPING

## BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Media cetak:  Bangka Pos  Babel Pos  
 Babel News  Radar Bangka  
 Rakyat Pos  Lainnya: \_\_\_\_\_

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
						√									

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
	√				

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
														√										

### BPK Temukan Penyalahgunaan Keuangan

## Oknum PNS Diduga Tilep Anggaran Rp 520 Juta

**MANGGAR** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (Babel) telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Tahun Anggaran 2015.

Dari Informasi yang di himpun ,harian ini berdasarkan salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Babel yang diterima, satu di antara hal yang tercantum pada LHP tersebut adalah adanya indikasi penyalahgunaan keuangan daerah sekitar Rp 520 juta.

Pada waktu itu, BPK Perwakilan Babel menulis bahwa temuan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Beltim Nomor 700/07/INPTGLHP-KHS/2015 tertanggal 31 Desember 2015.

Kepada wartawan, Kepala Inspektorat Kabupaten Beltim, Rodny Edwar Lumban Tobing juga membenarkan adanya catatan tersebut pada LHP BPK RI Babel terhadap LKPD Beltim Tahun Anggaran 2015.

Tobing menjelaskan, sebagaimana proses di Majelis Tim Penyelesaian Tagihan Ganti Rugi (MTPTGR), pejabat yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan tersebut telah diberikan waktu selama 40 hari sejak 1 Januari 2016 untuk menyelesaikan ganti rugi yang dimaksud. Pihak terkait juga memegang jaminan berupa sertifikat atas empat bidang tanah yang dimiliki oknum dan dinilai sebagai bukti adanya itikad baik untuk penyelesaian. "Dan Pejabat tersebut (Sekarang sudah diberhentikan sebagai PNS Beltim karena kasus lainnya (terkait disiplin-red)," ungkap Tobing.

Catatan ini dimuat pada bagian Penjelasan Neraca, Tagihan Jangka Panjang/ Ganti Rugi sebesar Rp 969,4 juta per 31 Desember 2015. Tagihan Ganti Rugi tersebut bertambah dari tahun sebelumnya Rp 448,9 juta (per 31 Desember 2014) karena indikasi penyalahgunaan keuangan daerah yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Beltim per 31 Desember 2015.

"Dalam LHP BPK RI Babel terhadap LKPD Beltim TA 2015, catatan ini diserahkan kembali ke MTPTGR untuk diselesaikan secara aturan yang berlaku. Kami ingin bahas seperti apa seharusnya tindak lanjutnya," sebutnya.

Tobing menambahkan, uang yang disalahgunakan oleh oknum ini adalah insentif upah pungut pajak daerah dan uang persediaan yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Uang itu adalah hak sejumlah pegawai dan pihak ketiga (rekanan). Namun hak itu tidak dibayarkan dan diindikasikan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dan, ia juga menyatakan penyalahgunaan ini merupakan kerugian keuangan daerah.

"Mengapa dikatakan dan merupakan kerugian keuangan daerah, karena adanya kewajiban daerah kepada pihak ketiga (rekanan) dan (pemberian) upah pungut kepada pegawai. Terkait ini pemerintah sudah membayar, tapi uangnya tidak sampai (ke penerima yang berhak), ada bukti pembayarannya. Dan Itu dianggap sama dengan kerugian keuangan daerah. Sebab, nantinya ini tetap merupakan kewajiban pemda kepada yang berhak," jelas Tobing.

Diakui Tobing, memang sejauh ini belum ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak atas uang yang diduga disalahgunakan terse-

but. Menurutnya, masalah ini diserahkan dan dipercayakan oleh mereka yang berhak untuk diselesaikan secara hukum.

Pihak hukum baik Polres Beltim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Beltim saat dikonfirmasi BE, Senin (22/8) kemarin, mengaku belum ada laporan terkait adanya kerugian dari pihak pihak yang dimaksud.

"Sejauh ini kita belum menerima laporan adanya kerugian dari pihak yang dimaksud, dan jika pun ada, kami nantinya akan kami konfirmasi lagi," ujar Kajari Beltim, Widagdo SH melalui Kasi Intel Kejari Beltim, Erwin

Hal senada juga disampaikan Kapolres Beltim, AKBP Nono Wardoyo Sik, bahwa pihaknya juga belum menerima adanya laporan kerugian dari pihak-pihak yang dinyatakan merugi. "Pihak kita sejauh ini belum menerima laporan dari kerugian yang disampaikan," sebut Kapolres.

Adapun oknum pejabat di DPPKAD Beltim yang diduga melakukan indikasi penyalahgunaan ini. Sebelumnya oknum ini, sudah diberhentikan sebagai PNS di Kabupaten Beltim. Tapi bukan karena dan terkait masalah dugaan penyalahgunaan yang dimaksud diatas. Oknum tersebut diperhentikan karena permasalahan kasus disiplin PNS. Tak lain terkait kasus menikah atau memiliki suami lebih dari satu. (feb)